

**THE ROLE OF SOCIAL SERVICES AND BREAKFAST OF
PEKANBARU CITY IN DEVELOPING PERSONS OF SOCIAL
WELFARE PROBLEMS (PMKS) IN PEKANBARU CITY IN 2019**

By: Elvi Rahmi

E-mail: rahmielvi123@gmail.com

Supervisor: Adlin, S.Sos, M.Si

E-mail: adlinoke@gmail.com

Department of Governmental Science
Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau
Bina Widya Campus, JL. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28283
Tel / Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Thesis writing entitled "The Role of the Pekanbaru City Social and Cemetery Service in Fostering Persons with Social Welfare Problems (PMKS) in Pekanbaru City in 2019". The causative factor for coaching Persons with Social Welfare Problems (PMKS) is the absence of facilities that support the development of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) in Pekanbaru City. This research was conducted in Pekanbaru. The purpose of this study is to describe the role of the Pekanbaru City Social and Cemetery Service in the Development of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) in Pekanbaru City in 2019. The theory used is the theory of guidance from Mathis. The research method used. The author is descriptive qualitative with data techniques, interviews and documentation. The type of data used by the author is primary data and secondary data. The result of this research is the lack of role of the Pekanbaru City Social and Cemetery Service in the Development of Persons with Social Welfare Problems (PMKS).

Keywords: *Role, Development, and Persons with Social Welfare Problems (PMKS)*

A. PENDAHULUAN

Tujuan negara adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 27 Ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya diperlukan adanya suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial pada skala nasional sebagaimana diamanatkan pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara dan pada Pasal 34 Ayat (2) dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Dalam mewujudkan tugas pemerintah tersebut diperlukan sumber daya manusia yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal.

PMKS merupakan Individu atau kelompok yang memiliki suatu kesulitan dikarenakan adanya gangguan dalam permasalahan sosial sehingga mengakibatkan kurang mampunya dalam melakukan fungsi sosial dan hubungan dengan lingkungannya serta kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani secara normal. Kategori PMKS sendiri

berjumlah 26 macam dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

B. KERANGKA TEORI

a. Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.¹ Saat ini Indonesia sudah berada dalam pemerintahan otonom, dimana setiap daerah memiliki otonomi daerah masing-masing atau mandiri dalam

¹Munaf, 2005, Hukum Administrasi Negera, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru. Hal. 47

mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan dan undang-undang berlaku.

b. Peran

Menurut Biddle dalam Suhardono berpendapat bahwa konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang dalam mengemban posisi suatu unit dari struktur sosial.² Sedangkan menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.³ Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

c. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil

yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.⁴

Menurut Mathis pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.⁵ Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan

²Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 14

³Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara Hal. 242

⁴Simanjuntak. 1990. *Psikolinguistik Perkembangan. Teori-teori Pemerolehan Fonologi*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hal. 84

⁵Mathis, Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat Hal. 112

organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.⁶

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif.

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Di Pekanbaru pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Alasan penulis menentukan lokasi penelitian ini dikarenakan Kurangnya pembinaan yang dirasakan oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama:

1. Kepala Bidang Resos Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
2. Kepala Seksi perlindungan dan Penyantunan Lansia
3. Masyarakat peserta PMKS

Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Pada penelitian ini data sekunder adalah:

1. Data Jumlah PMKS.

2. Data Jumlah Lansia Terlantar pada UPT Tresna Werdha Khusnul Khotimah.

3. Data Gambaran Umum Penelitian dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan adalah “orang-dalam” pada latar penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dari pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Pekanbaru Tahun 2019

1. Program yang disesuaikan dengan misi Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui memberikan bantuan dan jaminan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta meningkatkan kemampuan dan keberdayaan mereka melalui pendidikan. Selanjutnya, dalam kaitan pembangunan kesejahteraan sosial, penanganan dan penyelesaian

⁶Tanze, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. Hal. 144

permasalahan sosial juga dilakukan melalui skema jaminan sosial berbasis asuransi. Bantuan sosial (*social assistance*) merupakan bantuan yang diberikan secara langsung tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat, sedangkan jaminan sosial (*social insurance*) berbasis asuransi lebih bersifat sistem yang memanfaatkan iuran setiap peserta. Sistem ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu untuk dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam melewati berbagai situasi.

Pemerintah secara bertahap terus menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi, terutama, bagi kelompok masyarakat miskin. Jaminan sosial ini merupakan sistem yang mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang tidak mampu sehingga dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia. Pembangunan sistem jaminan sosial nasional dimulai dengan disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sesuai dengan amanat Pasal 28H perubahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penduduk

miskin dan rentan, terutama sebagai PMKS. Selain itu, dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara agar mereka memiliki kemampuan individual dan kelembagaan yang lebih tinggi dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial.

2. Adanya strategi tertentu untuk peningkatan taraf hidup masyarakat

Salah satu program atau kebijakan yang dirasakan peserta PMKS di Kota Pekanbaru yaitu berupa pemberian bantuan tunai dalam kurun waktu tertentu serta adanya penyuluhan berupa pemberian keterampilan untuk dapat digunakan mengembangkan usaha oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fakir miskin sebagai salah satu jenis PMKS yang memiliki salah satu programnya adalah pemberian beasiswa kepada masyarakat miskin yang rentan putus sekolah pada anak-anak fakir miskin. Dalam hal ini strategi yang dilakukan adalah pendekatan langsung kepada titik masalah yang dihadapi yang dalam hal ini adalah resiko putus sekolah karena biaya yang bisa diringankan oleh beasiswa maupun bantuan tunai kepada masyarakat miskin tersebut.

3. Pemberian terapi dalam bentuk program PKH

Dengan adanya program PKH untuk masyarakat miskin dengan salah satu bentuk programnya adalah pemberian dana bantuan sebagai modal usaha serta adanya keterampilan dalam hal ini adalah keterampilan memasak yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat peserta untuk memulai membuka usaha. Pihak Dinas Sosial dan Pemakaman memberikan modal dalam bentuk uang tunai serta memberikan modal keahlian dalam memasak. Kemudian masyarakat yang mengembangkannya sebagai usaha dan menjalankannya dengan baik.

Dari sisi lain Hafiz Sutrisno dalam penelitiannya menyatakan bahwa Keberadaan gelandangan dan pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial kemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan perlu segera dilakukan penanganan secara efektif dengan melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk merazia semua gelandangan dan pengemis yang ada di seluruh sudut Kota Pekanbaru, kemudian dijarah dan ditampung di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sekaligus dilaksanakan pendataan untuk kemudian dilaksanakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dengan adanya pembinaan

tersebut secara tidak langsung dapat mensejahterakan hidup gelandangan dan pengemis atau yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagaimana telah dirumuskan dalam Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah.⁷

4. Fasilitas yang belum memadai

Permasalahan terkait dengan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota Pekanbaru terkait dengan fasilitas yang belum memadai. Jika dirunut pada sumbernya maka dana anggaran yang belum maksimal adalah akar dari belum memadainya fasilitas yang mendukung program penyelesaian masalah PMKS di kota Pekanbaru. Hal ini dicontohkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru seperti hanya memiliki satu buah fasilitas pembinaan anak jalanan Loka Bina Karya (LBK) yang terdapat Jalan Datuk Wan Abdul Rahman.

Selain hanya memiliki satu fasilitas saja, fasilitas ini juga menggunakan sistem pemakai ganda yaitu tidak hanya untuk pembinaan

⁷Hafiz Sutrisno, 2020, Tanggung Jawab Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru, Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

anak jalanan saja melainkan bekerja sama dengan panti yang dimiliki oleh Provinsi, yang bernama Panti Sosial Bina Remaja (PBSR) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rumbai. masalah lain selain fasilitas dan anggaran, masalah lain yang di hadapi Dinas Sosial dan Pemakaman terkait penyelesaian masalah PMKS di kota Pekanbaru adalah masalah kesadaran yang belum dari masyarakat dengan kriteria PMKS. Hal ini dapat di contohkan pada masyarakat miskin yang kemudian mendapatkan dana bantuan tunai yang sebenarnya bertujuan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha keluarga misalnya sebagai penambah modal usaha atau keperluan dasar baik dalam bidang pendidikan mau kesehatan. Namun sebagian masyarakat penerima bantuan tersebut menggunakan untuk membeli hal kurang berguna atau terkesan barang mewah yang tidak menunjang kehidupan mereka.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan tujuan penelitian, maka diketahui bahwa ditemukan beberapa fakta dilapangan terkait dengan peran Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru dalam pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota Pekanbaru tahun 2019 yaitu kurang berperan karena kurang terlaksananya program-program yang dibuat oleh pemerintah disebabkan oleh keterbatasan dana. Terdiri dari Program yang disesuaikan dengan misi Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru. Adanya strategi tertentu untuk peningkatan taraf hidup

masyarakat. Pemberian terapi dalam bentuk program PKH. Fasilitas yang belum memadai. Oleh karna itu, saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar program-program yang telah dibuat tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya untuk mengurangi meningkatnya jumlah PMKS di Kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru agar menambah fasilitas yang dapat mendukung program-program terkait permasalahan PMKS di Kota Pekanbaru.
2. Kepada masyarakat dengan kriteria PMKS di Kota Pekanbaru dapat memiliki kesadaran bahwa program yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Syani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: Bumi. Aksara*
- Agus Dwiyanto, 2008, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta*
- Ahmadi, Abu. 1982. Psikologi Sosial. Surabaya: PT. Bina Ilmu*

- Bappenas, 2008, Pengembangan Kebijakan Nasional dan Tata Pemerintahan, Tim Bappenas, tidak diterbitkan
- Gulo W, 2005, *Metodelogi Penelitian*, Gramedia, Jakarta
- Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bandung:Ghalia
- Horoepoetri, Arimbi dan Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi
- Koswara.1994. *Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*. Jakarta: Widya Praja
- Mardiasmo, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPPAMP YKPN, Yogyakarta
- Mathis, Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat
- Munaf, 2005, *Hukum Administrasi Negera*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Narwoko, Dwi dan Suyanto Bagong. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pamudji, S. 1993. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara
- Riyadi. 2002. *Pengembangan Wilayah Teori dan konsep Dasar, dalam Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Simanjuntak. 1990. *Psikolinguistik Perkembangan. Teori-teori Pemerolehan Fonologi*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Soekanto, Soerjono.2002.*Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Suhardono, Edy. 1994.*Teori Peran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras
- Veithzal Rivai, 2004, *“Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan,Cetakan Pertama*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada

Yandianto. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S Bandung

Jurnal/Skripsi:

Erma Ullul Janah. 2018. Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Fakhmi Umar. 2017. Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Universitas Lampung

Falderama Frayogi. 2018. Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Membina Gelandangan Dan Pengemis Dalam Upaya Penerapan Ketertipan Umum. *Skripsi*. UIN Suska Riau

Irvan Ade Putra. 2014. Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. *Skripsi*. UIN Suska Riau

Oktia Nita. 2017. Penerapan Prinsip Good Governance Partisipasi, Transparansi, Responsif, Efektifitas Efisiensi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Upaya

Pemberdayaan Anak Jalanan. *Skripsi*. Universitas Lampung

Ririk Novembri. 2016. Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Surabaya. *Jurnal*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan.

Sintong Ketler S. 2012. Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2012. *Jurnal* Vol 1, No 2. Universitas Riau

Suhardi. 2013. Peran Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pembinaan Anak Jalanan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 2, No. 1. Universitas Tribhuwana Tungadewi

Syaifful Akbaruddin. 2018. Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Program Pemukiman Oleh Dinas Sosial Di Kota Surabaya. *Jurnal* Universitas Airlangga

Try Wiganda Irfan . 2012. Analisis Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan. *Jurnal* Vol 3, No 1. Universitas Riau

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia No. 8 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan
dan Pengelolaan Data
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan
Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Struktur dan Tata Kerja yang
baru untuk Dinas Sosial
dan Pemakaman Kota
Pekanbaru

Internet:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/03/14/dinas-sosial-kota-pekanbaru-belum-punya-tempat-khusus-untuk-rehabilitasi-pmks>

<http://bappeda.pekanbaru.go.id>

